

## **BAB II**

### **SAUDI VISION 2030 BENTUK BARU IDEOLOGI ARAB SAUDI**

Bab ini merupakan gambaran situasi mengenai revolusi kebijakan Arab Saudi yang melatarbelakangi fenomena penelitian yakni pemberitaan yang dilakukan CNN Indonesia tentang “Penyiar Perempuan Saudi Pertama”.

Sebelumnya, negara Arab Saudi sering mendapat kecaman negara–negara lain berkenaan dengan diskriminasi perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi adalah adanya pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di Arab Saudi. Isu ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya patriarki yang sudah tertanam sejak masa Pra-Islam. Ideologi Patriarki ini memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Laki-laki dalam tradisi masyarakat Arab Saudi tidak hanya mengontrol dalam bidang sosial ekonomi, seluruh pranata sosial, melainkan juga mengontrol jumlah populasi penduduk dalam suatu suku. Pembagian peran sudah terpola dengan jelas, laki-laki berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan berperan dalam urusan domestik dan reproduksi, seperti memelihara anak dan mengurus kebutuhan rumah tangga (Umar, 2001: 128-129).

Sistem patriarki tersebut mendasari beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan lainnya. Penelitian yang dilakukan AlSaied (2013: 11) melihat 3 masalah utama negara Arab Saudi yakni kemiskinan, buta huruf, dan diskriminasi perempuan. Dari ketiga permasalahan ini, perempuan menjadi kelompok yang terdiskriminasi secara ganda.

Persoalan kemiskinan diupayakan diatasi oleh negara dengan pemberlakuan jaminan sosial. Pada sektor ini, perempuan seringkali dipinggirkan karena mereka dianggap tidak bekerja/ tidak berpenghasilan sehingga jaminan sosial hanya diberikan kepada individu (yang bekerja) dan keluarga (melalui suami/ayah).

Permasalahan kedua buta huruf diatasi oleh negara dengan peningkatan pendidikan. Namun persoalannya, perempuan diharuskan memiliki persetujuan wali (laki – laki) untuk dapat menempuh pendidikan. Selain itu perempuan tidak diperbolehkan mengikuti studi teknik, politik, dan arsitektur, sehingga pada akhirnya mereka tidak memiliki peluang kerja yang luas.

Pernikahan anak juga diyakini sebagai salah satu penyebab terhambatnya pendidikan perempuan. Tingkat putus sekolah bagi perempuan meningkat ketika mereka mengalami pubertas. Proses ini kemudian dijadikan alasan untuk perempuan menikah. Perempuan yang telah sekolah, harus menghentikan proses pendidikannya di sekolah karena dipaksa atau terpaksa untuk menikah. Data menunjukkan setidaknya 25% perempuan muda tidak menghadiri kuliah karena menikah. Pada tahun 2005-2006, wanita memiliki tingkat putus sekolah sekitar 60%, melek huruf bagi perempuan sekitar 70% dan laki-laki 85% (Almunajedd, 2009).

Baik dari persoalan kemiskinan dan buta huruf saja, perempuan telah menjadi kelompok yang terdiskriminasi, diluar itu perempuan juga seringkali mendapatkan bentuk diskriminasi lainnya. Diskriminasi perempuan Arab Saudi terjadi secara fisik dan psikologis. Laporan data dari organisasi perempuan

(National Society for Human Rights, 2006: 93) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus perempuan mengalami kekerasan seksual seperti diperkosa dan dipaksa menjadi pelacur. Secara psikologis perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan dan memegang pendapat mereka sendiri. Dari data juga perempuan sering menjadi korban dalam perceraian rumah tangga. Mereka sering tidak mendapatkan hak asuh anak, bahkan tidak diperbolehkan menemui anak – anak mereka. Upaya menurunkan diskriminasi perempuan ini sering mengalami jalan buntu karena banyak perempuan korban diskriminasi tidak mau melaporkan kasus – kasus mereka.

Dalam dunia perfilman, fenomena diskriminasi terhadap perempuan Arab Saudi ini sering mengundang minat para cinematografer. Penelitian dilakukan oleh Muhammad A.M (2016) membedah sebuah karya film berjudul adalah “Wadjda” karya Haifaa al-Mansour yang dirilis pada tahun 2013. Latar belakang utama film ini adalah aturan Arab Saudi yang melarang perempuan untuk mengemudi. Film ini mengembangkan realitas perempuan Arab Saudi dalam struktur sosial yang didominasi oleh budaya patriarki. Film “Wadjda” menceritakan kisah seorang gadis tomboy berusia 12 tahun bernama Wadjada yang sangat menginginkan sepeda untuk beradu balap dengan sahabat laki-lakinya. Tentunya keinginan Wadjda ini sangat ditentang oleh keluarganya karena bagi mereka, seorang gadis tidak pantas menaiki sepeda dan dimungkinkan dapat merusak sistem reproduksi mereka.

Latar peraturan Arab Saudi melarang perempuan untuk mengemudi merupakan hal yang nyata/ realita. Pelarangan mengemudi ini diupayakan agar perempuan agar tidak sering meninggalkan rumah. Bahkan legitimasi aturan ini

terjadi. Sebagian besar ulama Saudi dan otoritas keagamaan telah menyatakan bahwa mengemudi adalah suatu yang diharamkan bagi perempuan. Pada akhirnya larangan ini merupakan hal yang cukup mempersulit perempuan dalam bergerak. Untuk dapat berpergian, perempuan harus memikirkan bagaimana transportasi yang akan mereka gunakan.

Hasil penelitian Muhammad A.M (2016) menunjukkan bahwa film garapan sutradara Haifaa al-Mansour ini telah berusaha menyuarakan dan mewakili perempuan Arab Saudi, di mana struktur patriarki telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sutradara film ini merupakan seorang sutradara perempuan berkebangsaan Arab Saudi yang telah menempuh pendidikan dan tertempa budaya Eropa. Film ini juga diproduksi oleh Razor Film yang merupakan sebuah perusahaan rumah produksi Jerman serta dirilis pertama kali di Jerman, sehingga budaya Barat juga kental dalam produksi ini, walaupun latar budaya patriarki dan agama di Arab Saudi sangat kental dalam film ini.

Iskandar Ritonga (2005: 13) menilai, banyak hal yang disalahgunakan dalam penafsiran tentang teks keagamaan yang akhirnya membuat bias peran gender yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, budaya patriarki yang terus menerus diproduksi, menjadi salah satu faktor yang membuat sesuatu yang sebenarnya salah kemudian menjadi hal yang diterima secara wajar. Perempuan menerima peran mereka dibawah tekanan patriarki dengan wajar karena sistem ini telah ada dan direproduksi oleh masyarakat.

Iskandar Ritonga menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender. Salah satunya disebabkan oleh

adanya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender dan juga konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki (Ritonga 2005:13). Bahkan dikatakan oleh Fakih (1996, 126) bahwa pandangan dan penafsiran agama semacam itu sudah ada dan tertanam sejak dulu. Ada pula penggambaran bahwa tuhan seolah-olah adalah laki-laki, penggambaran ini terjadi hampir disemua agama.

Faktor lain munculnya subordinasi terhadap perempuan adalah pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan irasional. Bahkan dalam mitologi Arab, perempuan dianggap tidak berdaya serta digambarkan sebagai tipu daya dan kelicikan (Barakat, 2012:135).

Namun ditahun 2016 hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi telah menggemparkan dunia dengan berbagai kebijakan baru. Pemerintah Arab Saudi baru kini terkenal dengan *Saudi Vision 2030*, banyak kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintahan Arab Saudi sejak Pangeran Mohammed Bin Salman memiliki kuasa mengatur kebijakan Arab Saudi. Kebijakan ini dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Arab Saudi dalam berbagai sektor umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata. Tentunya ada dana yang besar yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi dalam melaksanakan kebijakan baru ini. *Minister of Labor and Social Development* Arab, Ali bin Nasser Al-Ghafis menekankan bahwa Visi Arab Saudi 2030 didasarkan pada tiga poros utama: masyarakat yang hidup, ekonomi yang sejahtera, dan berupaya menjadi negri yang punya ambisius. Salah satu kebijakan yang berubah adalah tentang hak – hak perempuan. Perempuan Saudi adalah elemen penting dari kekuatan Arab.

Pemerintah akan terus mengembangkan bakat dan menginvestasikan energi untuk memungkinkan perempuan memperoleh peluang yang tepat untuk membangun masa depan mereka dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan ekonomi (Arabnews.com).

Beberapa tujuan mengenai hak dan perubahan kebijakan pada perempuan disampaikan dalam wacana Saudi Vision 2030 oleh Mohammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud sebagai *Chairman of the Council of Economic and Development Affair* diantaranya sebagai berikut. Pertama, negara berjanji akan terus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan sehingga baik pria maupun wanita generasi muda akan diperlengkapi untuk memiliki bekal pekerjaan dimasa depan. Kedua, pemerintah juga berjanji memberikan kesempatan yang sama yang salah satunya akan diwujudkan dalam setor perekonomian dengan memberikan kesempatan bagi semua orang baik pria dan wanita, tua dan muda sehingga mereka dapat berkontribusi pada kemampuan terbaik mereka serta menyumbang kemajuan sektor ekonomi. Wanita Saudi dilihat sebagai aset besar. Lebih dari 50 persen lulusan universitas adalah perempuan, pemerintah akan terus mengembangkan bakat mereka, berinvestasi dalam kemampuan produktif mereka dan memungkinkan mereka untuk memperkuat masa depan mereka dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan ekonomi. Ketiga, pemerintah akan bertanggung jawab dalam sektor bisnis. Diharapkan perusahaan– perusahaan Arab Saudi untuk mengamati tanggung jawab sosial mereka dan berkontribusi untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dengan menciptakan peluang merangsang bagi pria dan wanita muda yang dapat membantu mereka membangun

karir profesional mereka. Keempat, ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% menjadi 30% (Mohammad, 2016 : 35-72).

Kebijakan-kebijakan tersebut mulai banyak terealisasi diantaranya, Januari 2013, perempuan diumumkan mendapatkan porsi sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Negara. Tahun 2015, perempuan Arab diizinkan mencalonkan diri untuk jabatan dalam pemilihan kota. Awal tahun 2017, sekolah-sekolah negeri Saudi mengumumkan menawarkan kelas pendidikan jasmani untuk laki-laki dan perempuan. Ditahun yang sama, pemerintah Arab juga mengizinkan perempuan menghadiri acara olah raga termasuk di dalam stadion olahraga. Tercatat juga pada tanggal 26 September 2017, keputusan kerajaan memberikan hak kepada wanita untuk mengendarai kendaraan yang akan berlaku pada bulan Juni 2018.

Perubahan kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, tetapi bukan berarti tanpa kontroversi. Salah satu wacana yang menjadi kontroversi adalah wacana kebebasan berpakaian perempuan di wilayah NEOM. Sang Putra Mahkota juga berencana mengizinkan perempuan mengenakan bikini di wilayah NEOM nantinya yang akan diberlakukan pada tahun 2022. Rencana Pangeran Mohammed tentang wilayah NEOM ini pun menuai kontroversi baik dari dalam maupun luar Arab Saudi (detiknews.com).